

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 2 Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan kemudian ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yang terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Pemerintahan yang baik hanya dapat diwujudkan dalam Negara Hukum. Salah satu asas pemerintahan yang baik adalah asas akuntabilitas yang mengharuskan Pemerintah Daerah mempertanggungjawabkan seluruh tindakannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah terdiri atas pertanggungjawaban politik, hukum dan ekonomi.

Dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 pertanggungjawaban bisa dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang wajib dilakukan satu kali dalam setahun kepada Pemerintah Pusat sebagai dasar evaluasi dan bahan pembinaan Pemerintah Daerah selanjutnya dan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada DPRD dan menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bahan penilaian untuk menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban tersebut yang dapat berakibat pemberhentian Pemerintah Daerah dan pertanggungjawaban luar biasa yang diwajibkan oleh DPRD. Dalam bentuk meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam masa

jabatannya yang dapat berakibat Pemerintah Daerah tidak dapat dicalonkan untuk periode berikutnya.

Dinas pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Pada Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana menyelenggarakan pelaksanaan administrasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pelaksanaan pelayanan administrasi pada kantor Dinas Pariwisata dapat dilakukan melalui penataan sistem manajemen serta harus mengadakan pembinaan kelembagaan yang memungkinkan terciptanya pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pelayanan diperlukan usaha agar pelayanan administrasi berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban penyelenggaraan administrasi pemerintahan di dinas pariwisata kota padang. Oleh karena itu penulis memilih judul **“Pertanggung Jawaban Pengelolaan Keuangan Daerah di Dinas Pariwisata Kota Padang”** sebagai judul dalam tugas akhir ini.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, masalah yang dibahas di bidang Dinas Pariwisata Kota Padang adalah :

1. Bagaimana pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pariwisata Kota Padang?
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pariwisata Kota Padang?

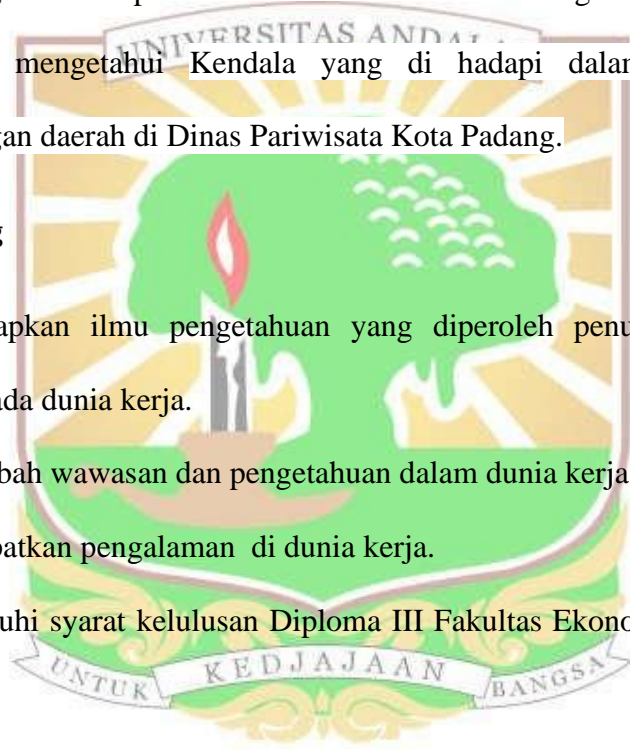
1.3 Tujuan Magang

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pariwisata Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Kendala yang di hadapi dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pariwisata Kota Padang.

1.4 Manfaat Magang

1. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis di bangku perkuliahan pada dunia kerja.
2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam dunia kerja.
3. Untuk mendapatkan pengalaman di dunia kerja.
4. Untuk memenuhi syarat kelulusan Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.



1.5 Tempat dan Waktu Magang

Untuk memenuhi mata kuliah yang harus saya ikuti ini, maka saya akan melaksanakan magang di Dinas Pariwisata Kota Padang selama 40 hari kerja dari tanggal 13 Januari 2020 – 5 Maret 2020

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan laporan ini adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi uraian latar belakang, perumusan masalah, tujuan magang, manfaat kegiatan magang, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan laporan magang.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang teori-teori pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintah pada dinas pariwisata kota padang.

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menggambarkan tentang bagaimana gambaran umum dari Dinas Pariwisata Kota Padang Visi dan Misi Dinas, lokasi, serta struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Padang yang akan dibahas.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang inti dari penulisan memuat tentang tinjauan terhadap penatausahaan keuangan yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kota Padang.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh penulis.

